

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2023**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Pangeran Mochamad Amin Komp. Pemda Kabupaten Musi Rawas  
Telp. (0733) 4550076 Fax. (0733) 45077  
[www.dinkes.musirawaskab.go.id](http://www.dinkes.musirawaskab.go.id) MUARA BELITI@musirawaskab.go.id

Nomor : 440/ 619/KES/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Kesehatan TA 2023**

Muara Beliti, 31 Januari 2024  
Kepada,  
Yth. Bupati Musi Rawas  
cq. Kepala Bagian Organisasi Setda  
di -  
Muara Beliti

Menindaklanjuti surat dari Bupati Musi Rawas nomor : 060/08/VIII/2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dengan ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS



drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS  
NIP. 198112062009032004

*ditere 31/1/2024*  
*guy*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis (Renstra) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mulai tahun 2015 disebut LKjIP setiap tahun berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra.

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dalam mengimplemetasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) kami susun, semoga dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta harapan kami dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi Peningkatan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Muara Beliti, 30 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS



drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS.  
PEMBINA  
NIP. 198112062009032004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL .....	V
DAFTAR DIAGRAM .....	VI
IKHTISAR EKSEKUTIF (RINGKASAN).....	VII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum .....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	5
D. Isu Strategis .....	6
E. Landasan Hukum .....	9
F. Sistematika .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	12
B. Indikator Kinerja Utama .....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....	20
Tahun 2022	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	24
dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 .....	25
dengan target Jangka Menengah	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan .....	26
Standar Nasional	
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....	27
dan Solusinya	
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	32
B. Realisasi Anggaran (Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran ..... yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja)	36

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Rekomendasi .....	45

#### **LAMPIRAN :**

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu (contoh : Penghargaan / Inovasi / Prestasi tahun 2022)

## Daftar Tabel

1. <b>Tabel 3.1</b> Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	20
2. <b>Tabel 3.2</b> Perbandingan Realisasi Kinerja .....	24
Tahun 2022 dengan Empat Tahun Terakhir	
3. <b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Realisasi Kinerja .....	25
Tahun 2021 dengan Target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2026	
4. <b>Tabel 3.4.</b> Analisis Efisiensi Penggunaan .....	31
Sumber Daya	
5. <b>Tabel 3.5</b> Analisis Program / Kegiatan yang.....	32
Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	
6. <b>Tabel 3.6</b> Realisasi keuangan yang Mendukung .....	36
Pencapaian Kinerja	
7. <b>Tabel 3.7</b> Realisasi Fisik dan Keuangan .....	38

## Ikhtisar Eksekutif (Ringkasan)

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas secara bertahap ingin mencapai sasaran pembangunan Kesehatan seperti yang ditelaah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 yang diatur dalam Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Musi Rawas 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah **Musi Rawas Maju, Mandiri, bermartabat**. Visi Pembangunan ini akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dinas Kesehatan masuk pada misi kedua yaitu Membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pada Misi ini dimaksudkan, untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tentram.

Pengembangan kebijakan pembangunan Kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan Kesehatan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi yang semakin meningkat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis yang ada pada rencana strategis yang ditetapkan dalam 4 (empat) Indikator kinerja utama yang menggambarkan capaian keberhasilan strategi yang merupakan perwujudan dan komitmen dalam waktu satu tahun.

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2023 indikator kinerja Dinas Kesehatan yang belum mencapai target yang ditetapkan. Indikator Kinerja utama yang pencapaiannya di bawah target yaitu :

1. Angka harapan hidup dari target 69,05 realisasi sebesar 68,95 dengan capaian sebesar 99,21 %.
2. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari target 80,06 predikat A, dengan realisasi BB nilai 75,60, persentase capaian 94,43 %.
3. Indeks profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas target 85 dengan realisasi 70,25 dan persentase capaian 82,64 %.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yang sudah mencapai target yaitu :

1. Angka Kematian Ibu dari target 88,05 per 100.000 KH dengan realisasi 30,82 per 100.000 KH dengan capaian sebesar 165,00 %.
2. Angka Kematian Bayi dari target 3,2 per 1.000 KH dengan realisasi 2,00 dengan capaian 133,55 %.
3. Prevalensi stunting dari target 8 % dengan realisasi 4,48 % dengan persentase capaian 199,25 %.

Beberapa penyebab dari keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan pemeriksaan selama enam kali dan sesuai standar.
2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan dan persalinan pada tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

3. Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan professional
4. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan.
5. Prevalensi stunting sudah memenuhi target, dikarenakan kegiatan intervensi gizi spesifik (Makanan Pendamping Asi, Asi eksklusif, Inisiasi menyusui dini (IMD), Vitamin A, PMT ibu Hamil KEK, PMT anak gizi kurang) rata-rata sudah mencapai target. Disamping itu, Pendekatan pemberian makanan tambahan dengan bahan lokal di desa merupakan contoh pendekatan lintas sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan stunting.
6. Perhitungan stunting melalui e ppgm berdasarkan by name, by address yang dilakukan melalui pengukuran di Posyandu dan kunjungan rumah.

Beberapa penyebab dari permasalahan capaian indikator pada Dinas Kesehatan antara lain :

1. Kegiatan antara bidang dan pengelola program belum semuanya bersinergi.
2. Keterbatasan anggaran dalam mencapai indikator kinerja.

Solusi yang akan dilakukan agar target indikator kinerja pada Dinas Kesehatan tercapaian antara lain :

1. Sinergitas dalam melaksanakan kegiatan dan pengelola program antar bidang baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
2. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi rencana kerja bidang Kesehatan yang telah di susun.

Pada Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan dana sebesar Rp. 195.446.228.485 dan terealisasi sebesar Rp. 168.462.798.926,15 dengan capaian 86,19 %.

Alokasi anggaran perjenis belanja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

### Rincian Alokasi Per jenis Belanja

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	<b>Belanja operasi :</b>	168.678.485.627	143.391.151.472,15	85,01
	a. Belanja Pegawai	94.752.137.478	80.352.574.236	84,80
	b. Belanja Barang dan Jasa	73.826.348.149	62.938.577.236,15	85,25
	c. Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100
2	<b>Belanja Modal :</b>	26.767.742.858	25.071.647.454	93,66
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	23.600.582.458	21.939.553.454	92,96
	b. Belanja modal Gedung dan bangunan	3.167.160.400	3.132.094.000	98,89
<b>Total</b>		<b>195.446.228.485</b>	<b>168.462.798.926,15</b>	<b>86,19</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pembangunan Kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah yang dimotori dan dikoordinasi oleh Pemerintah.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Tujuan diselenggarakan pemabngunan Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat Kesehatan masyarakat yang optimal.

Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pembangunan diwilayahnya termasuk bidang Kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang

mempengaruhinya yaitu indikator Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Per Kapita. Dengan demikian pembangunan Kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja.

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

## **B. Gambaran Umum**

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan.

Dinas kesehatan Kabupaten Musi Rawas melakukan pelayanan publik dengan 4 kategori yaitu *Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif*, selain itu juga melakukan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana, Pelayanan dan Rehabilitasi dampak Kesehatan serta memberikan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b) Sub bagian Keuangan dan Aset
  - c) Sub bagian Umum dan Perlengkapan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
  - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi
  - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c) Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c) Seksi Peningkatan Mutu, Akreditasi dan Jaminan Kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
  - a) Seksi Kefarmasian
  - b) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Alat Kesehatan
  - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas kemudian dirubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010, maka susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
2. UPT Instalasi Farmasi
3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. UPT Puskesmas Muara Beliti
  - b. UPT Puskesmas C. Nawangsasi
  - c. UPT Puskesmas L. Sidoharjo
  - d. UPT Puskesmas Terawas

- e. UPT Puskesmas Selangit
- f. UPT Puskesmas O.Mangunharjo
- g. UPT Puskesmas Sumber Harta
- h. UPT Puskesmas Megang Sakti
- i. UPT Puskesmas Kelingi IV C
- j. UPT Puskesmas Ciptodadi
- k. UPT Puskesmas Air Beliti
- l. UPT Puskesmas Muara Kelingi
- m. UPT Puskesmas Muara Lakitan
- n. UPT Puskesmas Jayaloka
- o. UPT Puskesmas BTS Ulu Cecar
- p. UPT Puskesmas Muara Kati
- q. UPT Puskesmas Karya Sakti
- r. UPT Puskesmas Sungai Bunut
- s. UPT Puskesmas Pian Raya

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas memiliki Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dengan penjabaran sebagai berikut :

#### a. Kedudukan dan Tugas Pokok

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan
- 2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

- 1) perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

D. Isu Stretegis

Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam pembangunan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas , antara lain :

1. Angka harapan hidup pada tahun 2021 yaitu 68,54 tahun, hal ini belum memenuhi target yaitu 68,26 Tahun.

2. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dikalangan masyarakat masih rendah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan yang diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang sesuai standar belum optimal.

Angka kematian Ibu pada tahun 2019 sebesar 95,80 per 100.000 KH, Tahun 2020 sebesar 94,07 per 100.000 KH sedangkan pada tahun 2021 sebesar 123,41 per 100.000 KH dari target 88,12 per 100.000 KH. Dengan Meningkatkannya Angka Kematian Ibu akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup. Kurangnya kompetensi nakes (khususnya bidan) dan sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas dan Poskesdes), Akses Jalan dan Fasilitas secara tidak langsung berpengaruh pada Angka Kematian Ibu.

2. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 sebesar 3,98 per 1.000 KH, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,2 per 1.000 KH sedangkan tahun 2021 6,17 per 1.000 KH dari target 3,7 per 1.000 KH. Program kesehatan Ibu dan anak sudah dilaksanakan secara optimal namun hasilnya belum signifikan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, masih terdapat persalinan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan, nutrisi yang kurang mencukupi pada waktu kehamilan, Keadaan geografis suatu daerah, serta kurangnya sosialisasi kesehatan ibu hamil dan bayi.

3. Isu Stunting

Pada tahun 2020 tercatat bahwa pertumbuhan anak-anak dengan tinggi badan kurang (pendek) dan sangat kurang (sangat pendek) yang dapat dikategorikan stunting, dengan jumlah jiwa yang

mencapai 1.857 jiwa anak-anak yang mengalami stunting pada tahun 2020, hal ini merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas bersama stakeholders terkait, upaya penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program antara lain program perbaikan gizi masyarakat.

4. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat masih di tempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Bersih dan sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, yang dapat mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.
  5. Masih kurangnya sarana sanitasi lingkungan
- b. Permasalahan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P)
1. Belum optimalnya peningkatan upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat.
  2. Masih banyaknya penyakit infeksi menular yang harus di tangani, di lain pihak ancaman Penyakit Tidak Menular juga meningkat.
  3. Pengaruh dari lingkungan strategis termasuk terjadinya pemanasan global dan transformasi demografi berakibat pada semakin menurunnya kualitas lingkungan serta semakin meningkatnya bencana.
- c. Permasalahan Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal oleh beban pembiayaan kesehatan. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri belum optimal.

2. Belum optimalnya penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

d. Permasalahan Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi.
2. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas sumber daya manusia kesehatan.
3. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sarana prasarana, peralatan kesehatan dan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan kesehatan.
4. Belum optimalnya penggunaan obat secara rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

Isu strategis pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup belum sesuai target
2. Stunting
3. Pelayanan Kesehatan yang belum optimal dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masih rendah

E. Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

## F. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Ikhtisar Eksekutif

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah / Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi/ Gambaran Umum
- C. Struktur Organisasi/ Tugas dan Fungsi
- D. Maksud dan Tujuan LKjIP / Isu Strategis
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) / Landasan Hukum
- F. Sistematika

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
  - 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
  - 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
  - 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya
  - 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

7. Analisis program/kegiatan yang Menunjang  
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

(Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja).

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

**LAMPIRAN:**

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu (contoh: Penghargaan / Inovasi / Prestasi Tahun 2023)

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan yang memuat kegiatan strategis dalam pembangunan Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi Kabupaten Musi Rawas yaitu **Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, dan Bermartabat (MANTAB)** dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang professional berbasis teknologi informasi
2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
3. Pemerataan infrastuktur berwawasan lingkungan
4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat

Dalam upaya mewujudkan misi yang diinginkan maka telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas, indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, indikatornya adalah Indeks Demokrasi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran dan indikator daerah yang ingin dicapai yaitu meningkatkan derajat Kesehatan, indikatornya adalah Indeks Kesehatan.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021–2026. Dengan tujuan akan memberikan arahan yang jelas untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Dinas Kesehatan merumuskan tujuan yang selaras dengan misi 2 (dua) Kabupaten Musi Rawas yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas yaitu : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Indikator kinerja usia harapan hidup, angka kematian Ibu, angka kematian bayi, Prevalensi stunting.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, indikatornya adalah :
  - a. Angka Harapan Hidup
  - b. Angka Kematian Ibu
  - c. Angka Kematian Bayi
  - d. Prevalensi Stunting
2. Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi Dinas Kesehatan, indikatornya adalah :
  - a. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
  - b. Indeks Profesionalitas Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan tersebut dilakukan melalui Program :

1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
  - 1.1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten / Kota.
  - 1.2. Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1.3. Kegiatan Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi
  - 1.4. Kegiatan Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
  - 2.1 Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.

- 2.2 Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
- 2.3 Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
  - 3.1 Kegiatan pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).
  - 3.2 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat Kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu perusahaan rumah tangga.
  - 3.3 Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.
  - 3.4 Penerbitan sertifikat laik Higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
  - 3.5 Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.
  - 3.6 Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industry rumah tangga
4. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
  - 4.1 Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah Kabupaten/Kota
  - 4.2 Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota.
  - 4.3 Pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  - 5.2 Administrasi keuangan daerah
  - 5.3 Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  - 5.4 Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
  - 5.5 Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - 5.6 Administrasi umum perangkat daerah
  - 5.7 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - 5.8 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  - 5.9 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga / instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai prioritas program dan kegiatan mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Rencana Strategis (RENJA) satuan perangkat daerah.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dapat mengetahui kinerja selama satu tahun. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk kedepannya, sehingga dapat meraih tujuan, sasaran dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mengukur capaian setiap sasaran strategis ditetapkan sejumlah indikator dan untuk memudahkan disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja utama dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas**

Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Data Awal Renstra/RPJMD Tahun 2020	Tahun					Akhir Renstra /RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Kondisi Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,34	68,54	69,01	69,5	69,75	70,01	70,05
	2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Hidup	88,12	88,12	88,09	88,05	88,05	75,45	62,86
	3	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,77	3,7	3,2	3,01	2,5	2	2
	4	Prevalensi Stunting	%	%	10%	8%	6%	4%	2%	0%

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi dan Edaran Menteri Pan Nomor : SE/31/M/Pan/12/2004 tentang Perjanjian Kinerja dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tatacara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang mempersentasikan Tekad dan Janji untuk mencapai Kinerja yang mempertimbangkan Sumber Daya yang ada.

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023. Format Penulisan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Perjanjian Kinerja Eselon II pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya kondisi Kesehatan masyarakat yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	69, 5 Tahun
		Angka Kematian Ibu	88,05 per 100.000 kh
		Angka Kematian Bayi	3,01 per 1.000 kh
		Prevalensi Stunting	6 %
2	Meningkatnya tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas	A (80,06)

		Indeks profesionalitas Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas	85
--	--	--	----

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.901.793.071	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 75.661.678.847	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 5.169.487.567	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 362.287.000	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.350.982.000	APBD
 Total Anggaran	 Rp. 195.446.228.485	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan target berdasarkan sasaran strategis pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	5	6	7 = 6/5*100
1	Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	69,5 Tahun	68,95 Tahun	99,21
		2. Angka Kematian Ibu	88,05 per 100.000 KH	30,82 per 100.000 KH	165,00
		3. Angka Kematian Bayi	3,01 per 1.000 KH	2,00 per 1.000 KH	133,55
		4. Prevalensi Stunting	6 %	4,48 %	199,25
2	Meningkatnya tata kelola Administrasi Pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	A (80,06)	B (75,60)	94,43
		Indeks Propesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	85	70,25	82,64

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, sasaran strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi dua yaitu : Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas dan meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kesehatan

Capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas yaitu :

1) Angka Harapan Hidup

Target Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 sebesar 69,5 tahun realisasi 68,95 tahun dengan capaian sebesar 99,21 tahun . Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup itu sendiri.

Peningkatan Akses dan Kualitas, baik itu pelayanan maupun fasilitas kesehatan mampu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga angka kesakitan (Morbiditas) dan angka kematian (Mortalitas) dapat ditekan serendah mungkin.

2) Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu dari target 88,05 per 100.000 kelahiran hidup dengan realisasi 30,82 per 100.000 kelahiran hidup dan capaian sebesar 165,00 %. Pada tahun 2023 berdasarkan target Angka kematian Ibu mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan pemeriksaan selama enam kali sesuai standar ke fasilitas pelayanan Kesehatan, peningkatan kompetensi nakes (khususnya bidan) dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

(Puskesmas dan Poskesdes), Pembukaan Akses Jalan dan Fasilitas merupakan penunjang kesehatan yang secara tidak langsung dapat menurunkan Angka Kematian Ibu.

### 3) Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2023 target angka kematian Bayi sebesar 3,01 per 1.000 kelahiran hidup, dimana reliasasi adalah 2,00 per 1.000 kh dengan capaian sebesar 133,55 %.

Penurunan Angka kematian Bayi di tahun 2023 di pengaruhi adanya pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan, adanya kesadaran masyarakat terutama Ibu hamil melakukan pemeriksaan dan persalinan pada tenaga Kesehatan di fasyankes, tenaga Kesehatan yang berkonpten dan professional.

### 4) Prevalensi Stunting

Capaian Prevalensi stunting pada Kabupaten Musi Rawas sebesar tahun 2023 sebesar 4,48 % dari target 6 %. Hal ini menunjukkan bahwa kasus stunting dalam kategori rendah. Prevalensi stunting sudah memenuhi target dikarenakan adanya kegiatan intervensi gizi spesipik (makanan pendamping ASI, ASI Eksklusif, Inisiasi menyusui dini (IMD), Vitamin A, PMT Ibu hamil KEK, PMT anak gizi kurang) rata-rata sudah mencapai target. Perhitungan stunting melalui e ppgm berdasarkan by name, by adres yang dilakukan melalui pengukuran di Posyandu dan kunjungan rumah.

Dalam rangka penurunan stunting pada tahun 2023, Dinas Kesehatan melalui program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat, sub kegiatan pengelolaan pelayanan gizi Masyarakat mengadakan pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal. Salah satu

pendekatan yang efektif adalah dengan memanfaatkan bahan lokal yang tersedia di lingkungan desa untuk menciptakan makanan tambahan yang sehat dan kaya nutrisi. Pendekatan pemberian makanan tambahan dengan bahan lokal di desa sangat relevan dengan pengentasan stunting. Dengan memanfaatkan bahan lokal yang kaya akan nutrisi, kita dapat menyediakan makanan tambahan yang diperlukan oleh anak-anak untuk pertumbuhan yang optimal. Bahan-bahan lokal ini sering kali mengandung vitamin, mineral, protein, dan serat yang esensial untuk perkembangan fisik dan kognitif anak-anak.

- b. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan dengan indikator :

1). Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan pada tahun 2023 memperoleh nilai SAKIP BB (75,60). SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi.

2) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan

Nilai Indeks profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar 70,25 dengan capaian 82,64 %.

**A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan dua tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan lima**  
**Tahun Terakhir**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	67,34	67,86	68,14	68,26	68,62	68,95
		2. Angka Kematian Ibu	164,86 per 100.000 KH	95,80 per 100.000 KH	94,07 per 100.000 KH	123,41 per 100.000 KH	70,39 per 100.000 KH	30,82 per 100.000 KH
		3. Angka Kematian Bayi	6,46 per 1.000 KH	3,98 per 1.000 KH	4,17 per 1.000 KH	6,17 per 1.000 KH	3,1 per 1.000 KH	2,00 per 1.000 KH
		4. Prevalensi Stunting	-	-	-	6,85 %	4,1 %	4,48 %

2	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	BB	BB	BB	BB	BB (74,75)	BB (75,60)
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas			48,49	59,43	60,02	70,25

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2026

No	Sasaran Strategus	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
					$5/4 \times 100$		$5/7 \times 100$
1	Meningkatnya Kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas	1. Angka Harapan Hidup	69,5	68,95	99,21	70,05	98,43 %
		2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	88,05	30,82 per 100.000 KH	165,00	62,86 per 100.000 KH	49,02 per 100.000 KH
		3. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	3,01	2,00 per 1.000 KH	133,55	2 per 1.000 KH	1,00 per 1.000 KH
		4. Prevalensi Stunting	6 %	4,48 %	199,25	0 %	0 %
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	A (80,06)	BB (75,60)	95	A	A
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	85	70,25	79,55	95	73,94

#### A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)

##### a. Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	2023
1	Sumatera Selatan	70,66
2	Ogan komering ulu	68,85
3	Ogan komering ilir	69,31
4	Muara enim	69,72
5	Lahat	66,87
6	Musi Rawas	68,95
7	Musi Banyuasin	69,51
8	Banyuasin	69,76
9	Ogan komering ulu Selatan	67,88
10	Ogan komering ulu timur	69,78
11	Ogan ilir	66,33
12	Empat lawang	65,73
13	Pali	68,96
14	Musi rawas utara	66,37
15	Palembang	71,99
16	Prabumulih	71,27
17	Pagar alam	67,70
18	Lubuklinggau	70,25

Sumber : Statistik.

##### b. Realisasi Angka Kematian Ibu

Realisasi jumlah Kematian Ibu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 sebanyak 2 orang. Angka kematian Ibu dari target 88,05 per 100.000 kelahiran hidup dengan realisasi 30,82 per 100.000 kelahiran hidup dan capaian sebesar 133,55 %.

##### Angka kematian Ibu per Kabupaten / Kota Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	2023
1	Kabupaten Banyuasin	10
2	Kabupaten Empat Lawang	2

3	Kabupaten Lahat	6
4	Kabupaten Muara Enim	14
5	Kabupaten Musi Banyuasin	10
6	Kabupaten Musi Rawas	2
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	5
8	Kabupaten ogan ilir	6
9	Kabupaten komering ilir	4
10	Kabupaten komering ulu	7
11	Kabupaten komering ulu Selatan	2
12	Kabupaten komering ulu Timur	4
13	Kabupaten Penukal arab lematang ilir	2
14	Kota Lubuklinggau	7
15	Kota Pagar Alam	3
16	Kota Palembang	16
17	Kota Prabumulih	5
18	Sumatera Selatan (Ad ditolak)	1

Sumber : Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) Kemenkes.

c. Realisasi Angka Kematian Bayi

Realisasi jumlah kasus Angka Kematian Ibu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 sebanyak 14 orang. Pada tahun 2023 target angka kematian Bayi sebesar 3,01 per 1.000 kelahiran hidup, dimana reliasasi adalah 2,15 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian sebesar 128,57 %.

Angka kematian Bayi per Kabupaten / Kota  
Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	2023
1	Kabupaten Banyuasin	55
2	Kabupaten Empat Lawang	20
3	Kabupaten Lahat	40
4	Kabupaten Muara Enim	75
5	Kabupaten Musi Banyuasin	56
6	Kabupaten Musi Rawas	13
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	20
8	Kabupaten ogan ilir	30

9	Kabupaten komering ilir	28
10	Kabupaten komering ulu	51
11	Kabupaten komering ulu Selatan	18
12	Kabupaten komering ulu Timur	69
13	Kabupaten Penukal arab lematang ilir	22
14	Kota Lubuklinggau	24
15	Kota Pagar Alam	11
16	Kota Palembang	104
17	Kota Prabumulih	28
18	Sumatera Selatan (Ad ditolak)	2

Sumber : Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) Kemenkes.

### c. Prevalensi Stunting

Sedangkan prevalensi stunting tahun 2022 berdasarkan SSGI sebesar 25,4 % turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 28,3 %. Perhitungan Prevalensi stunting pada Dinas Kesehatan berdasarkan laporan melalui aplikasi EPPGBM, capaian kinerja tahun 2023 prevlensi stunting sebesar 4,48 %. Berpedaan data tersebut disebabkan sebagai berikut :

No	SSGI	EPPGBM
1	Merupakan survey nasional yang dilakukan setahun sekali	data laporan bulanan puskesmas
2	Menggunakan metodologi penelitian yang di tentukan oleh pakar secara nasional, seperti penentuan wilayah lokus,dan perhitungan sample dan sebagainya	tidak menggunakan metodologi ( semua balita yang ditemukan di wilayah puskesmas)
3	Tenaga Ahli/terlatih	Tenaga tidak terlatih
4	Alat akurat	Alat ukur tidak semuanya akurat
5	Cara pengukuran di pantau	Cara pengukuran tidak di pantau
		Kemungkinan ada kesalahan pengimputan data ke aplikasi

#### **A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Beberapa penyebab dari keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran strategis yaitu meningkatnya kondisi masyarakat yang berkualitas dengan indikator Angka Kematian Ibu, Angka kematian Bayi dan Prevalensi Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan pemeriksaan selama enam kali dan sesuai standar.
2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan dan persalinan pada tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
3. Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan professional
4. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan.
5. Prevalensi stunting sudah memenuhi target, dikarenakan kegiatan intervensi gizi spesipik (Makanan Pendamping Asi, Asi eksklusif, Inisiasi menyusui dini (IMD), Vitamin A, PMT ibu Hamil KEK, PMT anak gizi kurang) rata-rata sudah mencapai target. Disamping itu, Pendekatan pemberian makanan tambahan dengan bahan lokal di desa merupakan contoh pendekatan lintas sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan stunting.
6. Perhitungan stunting melalui e ppgm berdasarkan by name, by address yang dilakukan melalui pengukuran di Posyandu dan kunjungan rumah.

Beberapa penyebab dari permasalahan capaian indikator pada Dinas Kesehatan antara lain :

1. Kegiatan antara bidang dan pengelola program belum semuanya bersinergi.
2. Keterbatasan anggaran dalam mencapai indikator kinerja.

Solusi yang akan dilakukan agar target indikator kinerja pada Dinas Kesehatan tercapai antara lain :

1. Sinergitas dalam melaksanakan kegiatan dan pengelola program antar bidang baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
2. Pemenuhan dokumen sebagai data/informasi untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada perangkat daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas melalui kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan terus berusaha memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap fasyankes (RS, Puskesmas, Poskesdes, Klinik Swasta), Sehingga diharapkan dengan

adanya standarisasi, maka masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kedepannya Dinas Kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan upaya kuratif, promotive, kuratif dan rehabilitative sehingga derajat Kesehatan dapat tercapai.

#### **A. 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Untuk menghitung efisiensi sumber daya, perlu diuraikan target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih, kemudian dihitung penyerapan anggaran atas program yang mendukung indikator kinerja sasaran tersebut.

Berikut tabel analisis efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 :

Tabel 3.4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100%)	Program	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kondisi kesehatan masyarakat Yang Berkualitas	1	Angka Harapan Hidup	99,21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	10,02
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	83,48	16,52
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	77,76	22,24
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	81,56	18,47
		2	Angka Kematian Ibu	112,49	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91,12	8,88
		3	Angka Kematian Bayi	128,57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	72,15	27,85
		4	Prevalensi Stunting	199,25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94,14	5,86
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,46	9,54
		2	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55,74	44,26

### A.7. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan dana sebesar Rp. 195.446.228.485,00 dan terealisasi sebesar Rp. 168.462.798.926,15 dengan capaian sebesar 86,19 %.

Alokasi anggaran perjenis belanja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### Rincian Alokasi Per jenis Belanja

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	<b>Belanja operasi :</b>	168.678.485.627	143.391.151.472,15	85,01
	a. Belanja Pegawai	94.752.137.478	80.352.574.236	84,80
	b. Belanja Barang dan Jasa	73.826.348.149	62.938.577.236,15	85,25
	c. Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100
2	<b>Belanja Modal :</b>	26.767.742.858	25.071.647.454	93,66
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	23.600.582.458	21.939.553.454	92,96
	b. Belanja modal Gedung dan bangunan	3.167.160.400	3.132.094.000	98,89
	<b>Total</b>	<b>195.446.228.485</b>	<b>168.462.798.926,15</b>	<b>86,19</b>

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023 hampir seluruhnya mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun kontribusi Program/Kegiatan atas pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Analisis Program/Kegiatan yang menunjang**  
**Keberhasilan atau kegagalan pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Program/kegiatan	Indikator	Keterangan
Meningkatnya Kondisi kesehatan masyarakat Yang Berkualitas	Program pemenuhan upaya kesehatan dan upaya Kesehatan masyarakat		
	1 Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM yang dilaksanakan	Pemenuhan Sarana, prasarana, alat Kesehatan, obat-obatan, BMHP, pemeliharaan dan kalibrasi alat medis/penunjang medis mempengaruhi peningkatan mutu pelayanan Kesehatan secara tidak langsung dapat menurunkan angka kematian.
	2 Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah yang dilaksanakan	Upaya kesehatan melalui peningkatan kesehatan (promotive) dan pencegahan penyakit (preventif) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan akan mempengaruhi derajat Kesehatan dan menurunkan kesakitan dan angka kematian.
	3 Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi	Cakupan kegiatan system informasi	Kegiatan penilaian kinerja pada pelayanan

			Kesehatan secara terintegrasi yang dilaksanakan	Kesehatan memberikan pengaruh positif dalam rangka peningkatan mutu atau kualitas pelayanan Kesehatan pada Masyarakat
	4	Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan mutu pada fasilitas pelayanan Kesehatan	Melalui akreditasi, fasilitas pelayanan Kesehatan menerapkan prosedur standar dengan baik sehingga akan memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga kegiatan ini berpengaruh baik terhadap indikator utama yang akan dicapai.
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		
	1	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Cakupan kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan yang dilaksanakan	Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan memberikan pengetahuan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang Kesehatan sehingga pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat semakin baik dan berkualitas
	2	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan yang dilaksanakan	
		Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman		
	1	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri	Cakupan Penerbitan	Kegiatan terkait produk makanan,

		rumah tangga dan nomor P-IRTP sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRTP sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang dilaksanakan	minuman merupakan upaya untuk mencegah kemungkinan tidak terkontaminasi oleh bakteri yang dapat membahayakan Kesehatan manusia
	2	Pemeriksaan dan tindaklanut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Cakupan Pemeriksaan dan tindaklanut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang dilaksanakan	Kegiatan pemeriksaan post market merupakan upaya untuk mengawasi aspek keamanan pangan produk yang beredar agar tidak membahayakan Masyarakat.
	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			
	1	Advokasi, pemberdayaan, kemitraaan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan Advokasi, pemberdayaan, kemitraaan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah yang dilaksanakan	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang Kesehatan berpengaruh dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
	2	Pelaksanaan Kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan Kesehatan dalam rangka promotif preventif tingkat daerah yang dilaksanakan	Upaya kesehatan melalui peningkatan kesehatan (promotive) dan pencegahan penyakit (preventif) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan akan mempengaruhi derajat Kesehatan dan menurunkan kesakitan dan angka kematian

	3	Pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah yang dilaksanakan	Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat dalam bidang Kesehatan berpengaruh dalam meningkatkan derajat kesehatannya
Meningkatnya kualitas tata Kelola Dinas Kesehatan	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota			
	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan yang tersedia	Ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Dengan tata Kelola yang baik akan berpengaruh pada capaian kinerja.
	2	Administrasi perangkat daerah	Cakupan kegiatan administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	
	3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Cakupan kegiatan administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan	
	4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan kegiatan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	
	5	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Administrr kegiatan adminitrasi umum yang dilaksanakan	
	6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	
	7	Pengadaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan kegiatan Pengadaan jasa	

			penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan
	8	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan
	9	Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan BLUD

**B. REALISASI ANGGARAN**

**Tabel 3.6.**

**REALISASI KEUANGAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kondisi kesehatan masyarakat Yang Berkualitas	Angka Harapan Hidup	69,5	68,95	99,21 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	71.439.879.096	64.826.420.483	90,74
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.169.487.567	4.315.264.400	83,48
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	362.287.000	281.713.100	77,76
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.350.982.000	1.101.903.041	81,56
		Angka Kematian Ibu	88,095 Per 100.000 KH	77,05 Per 100.000 KH	112,49	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.627.447.659	1.387.883.200	85,28

		Angka Kematian Bayi	3,01 per 1.000 KH	2,15 per 1.000 KH	128,57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.500.000	21.533.300	73
		Prevalensi Stunting	6 %	4,48 %	199,5 %	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.564.852.092	1.844.907.402	72
<b>2</b>	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	A (80,06)	BB (75,60)	94,43 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	112.901.793.071	94.684.174.100,15	83,86
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	85	70,25	82,64				
							195.446.228.485	168.462.798.926,15	86,19

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan**

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Kesehatan											
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2023	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kondisi Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas</b>											
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>										
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<b>30.753.309.102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>7.449.582.844.00</b>	<b>24.22</b>	<b>9.518.468.964.00</b>	<b>30.95</b>	<b>29.149.047.735.00</b>	<b>94.78</b>
	1.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000.00	0.00	99.85	0.00	0	0.00	0	199.700.000.00	0
	1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	200.000.000.00	0.00	99.9	0.00	0	0.00	0	199.800.000.00	0
	1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.280.009.160.00	0.00	99.25	0.00	0	0.00	0	2.262.882.450.00	0
	1.1.4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.357.574.402.00	0.00	93.73	0.00	0	0.00	0	3.146.974.350.00	0
	1.1.5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000.00	0.00	86.65	29.055.600.00	0	37.833.620.00	0	216.630.215.00	0
	1.1.6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.671.732.028.00	0.00	98.86	7.071.298.244.00	0	9.476.636.244.00	0	12.527.780.200.00	0
	1.1.7	Pengadaan Obat, Vaksin	886.530.000.00	0.00	51.61	0.00	0	0.00	0	457.522.630.00	0
	1.1.8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.084.210.000.00	0.00	68.65	0.00	0	3.999.100.00	0	1.430.822.686.00	0
	1.1.9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	506.579.000.00	0.00	94.42	19.345.000.00	0	0.00	0	478.313.704.00	0
	1.1.10	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.298.253.512.00	0.00	98.99	329.884.000.00	0	0.00	0	8.214.394.000.00	0
	1.1.11	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	18.421.000.00	0.00	77.24	0.00	0	0.00	0	14.227.500.00	0
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<b>43.839.706.465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>17.856.181.853.00</b>	<b>40.73</b>	<b>24.134.199.122.00</b>	<b>55.05</b>	<b>38.322.655.172.00</b>	<b>87.42</b>

	1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.588.247.659.00	0.00	84.98	436.125.000.00	0	892.950.000.00	0	1.349.726.600.00	0
	1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.200.000.00	0.00	97.34	2.534.500.00	0	0.00	0	38.156.600.00	0
	1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	29.500.000.00	0.00	72.99	1.200.000.00	0	11.024.500.00	0	21.533.300.00	0
	1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	396.000.000.00	0.00	71.32	54.960.000.00	0	3.075.000.00	0	282.446.400.00	0
	1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	503.950.000.00	0.00	81.87	124.375.000.00	0	129.770.000.00	0	412.559.600.00	0
	1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	430.000.000.00	0.00	90.58	115.080.000.00	0	247.980.000.00	0	389.481.208.00	0
	1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	434.181.000.00	0.00	88.72	103.877.600.00	0	220.562.600.00	0	385.204.700.00	0
	1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.000.000.00	0.00	99.25	10.924.900.00	0	16.174.900.00	0	19.849.900.00	0
	1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	402.554.000.00	0.00	73.44	1.999.750.00	0	13.899.750.00	0	295.630.604.00	0
	1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	321.000.000.00	0.00	65.56	68.109.800.00	0	124.629.800.00	0	210.440.800.00	0
	1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	747.380.000.00	0.00	49.67	96.998.700.00	0	227.678.700.00	0	371.253.700.00	0
	1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	237.600.000.00	0.00	87.45	30.462.700.00	0	58.972.700.00	0	207.777.700.00	0
	1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	40.900.000.00	0.00	94.43	0.00	0	10.680.000.00	0	38.620.000.00	0
	1.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.000.000.00	0.00	75	0.00	0	1.500.000.00	0	1.500.000.00	0
	1.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.168.852.092.00	0.00	72.04	278.060.000.00	0	536.107.802.00	0	1.562.461.002.00	0
	1.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	130.000.000.00	0.00	81.17	20.370.000.00	0	51.491.300.00	0	105.525.000.00	0
	1.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	619.600.000.00	0.00	66.31	83.590.000.00	0	176.861.100.00	0	410.849.950.00	0
	1.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	796.962.932.00	0.00	84.73	0.00	0	428.872.000.00	0	675.272.000.00	0
	1.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.000.000.00	0.00	100	0.00	0	0.00	0	50.000.000.00	0
	1.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	442.393.200.00	0.00	76.07	84.175.200.00	0	166.854.400.00	0	336.509.500.00	0
	1.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	133.000.000.00	0.00	78.36	0.00	0	62.490.000.00	0	104.215.000.00	0

	1.2.22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	150.000.000.00	0.00	89.99	70.619.550.00	0	103.395.550.00	0	134.988.700.00	0
	1.2.23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.007.991.117.00	0.00	79.34	840.586.750.00	0	1.672.576.750.00	0	3.179.789.710.00	0
	1.2.24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.479.274.900.00	0.00	94.14	9.813.188.993.00	0	17.333.418.493.00	0	23.985.305.645.00	0
	1.2.25	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	11.541.800.00	0.00	100	0.00	0	9.516.800.00	0	11.541.800.00	0
	1.2.26	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	100	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	1.2.27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	848.313.765.00	0.00	70.91	5.575.600.043.00	0	55.756.000.00	0	601.551.260.00	0
	1.2.28	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.931.864.000.00	0.00	81.8	0.00	0	1.251.560.830.00	0	2.398.249.396.00	0
	1.2.29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000.00	0.00	98.07	43.343.367.00	0	69.200.147.00	0	196.142.347.00	0
	1.2.30	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	93.200.000.00	0.00	82.99	0.00	0	38.190.000.00	0	77.350.000.00	0
	1.2.31	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	15.100.000.00	0.00	14.24	0.00	0	2.150.000.00	0	2.150.000.00	0
	1.2.32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	223.800.000.00	0.00	93.59	0.00	0	121.425.000.00	0	209.455.100.00	0
	1.2.33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	10.000.000.00	0.00	93.44	0.00	0	0.00	0	9.344.400.00	0
	1.2.34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	335.300.000.00	0.00	73.9	0.00	0	95.435.000.00	0	247.773.250.00	0
1.3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	<b>520.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>163.970.000.00</b>	<b>31.53</b>
	1.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	520.000.000.00	0.00	31.53	0.00	0	0.00	0	163.970.000.00	0
1.4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>548.663.280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>57.019.400.00</b>	<b>10.39</b>	<b>116.337.998.00</b>	<b>21.2</b>	<b>445.071.478.00</b>	<b>81.12</b>
	1.4.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	548.663.280.00	0.00	81.12	57.019.400.00	0	116.337.998.00	0	445.071.478.00	0
<b>2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>											
2.1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	<b>50.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>8.600.000.00</b>	<b>17.2</b>	<b>9.400.000.00</b>	<b>18.8</b>	<b>44.900.000.00</b>	<b>89.8</b>
	2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000.00	0.00	88.8	6.700.000.00	0	0.00	0	22.200.000.00	0

	2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000.00	0.00	90.8	1.900.000.00	0	9.400.000.00	0	22.700.000.00	0
	2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<b>4.105.660.567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1.568.750.000.00</b>	<b>38.21</b>	<b>4.941.500.000.00</b>	<b>120.36</b>	<b>4.061.836.600.00</b>	<b>98.93</b>
	2.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000.00	0.00	93.25	8.000.000.00	0	14.800.000.00	0	18.650.000.00	0
	2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4.034.000.000.00	0.00	99.04	1.560.750.000.00	0	4.918.500.000.00	0	3.995.346.000.00	0
	2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.660.567.00	0.00	92.61	0.00	0	8.200.000.00	0	47.840.600.00	0
	2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.013.827.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>208.527.700.00</b>	<b>20.57</b>
	2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.013.827.000.00	0.00	20.57	0.00	0	0.00	0	208.527.700.00	0
<b>3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>											
	3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<b>20.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1.377.500.00</b>	<b>6.89</b>	<b>1.377.500.00</b>	<b>6.89</b>	<b>19.850.000.00</b>	<b>99.25</b>
	3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000.00	0.00	99.25	1.377.500.00	0	1.377.500.00	0	19.850.000.00	0
	3.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99.25</b>
	3.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<b>153.631.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>42.030.500.00</b>	<b>27.36</b>	<b>42.480.500.00</b>	<b>27.65</b>	<b>127.180.000.00</b>	<b>82.78</b>
	3.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	153.631.000.00	0.00	82.78	42.030.500.00	0	42.480.500.00	0	127.180.000.00	0
	3.4	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	<b>188.656.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000.00</b>	<b>2.12</b>	<b>4.000.000.00</b>	<b>2.12</b>	<b>134.683.100.00</b>	<b>71.39</b>

		sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
	3.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	188.656.000.00	0.00	71.39	4.000.000.00	0	4.000.000.00	0	134.683.100.00	0
<b>4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>											
	4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>109.255.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000.00</b>	<b>2.15</b>	<b>22.350.000.00</b>	<b>20.46</b>	<b>102.362.031.00</b>	<b>93.69</b>
	4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	109.255.000.00	0.00	93.69	2.350.000.00	0	22.350.000.00	0	102.362.031.00	0
	4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>88.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1.583.000.00</b>	<b>1.8</b>	<b>21.583.000.00</b>	<b>24.53</b>	<b>87.794.010.00</b>	<b>99.77</b>
	4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	88.000.000.00	0.00	99.77	1.583.000.00	0	21.583.000.00	0	87.794.010.00	0
	4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.153.727.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>261.710.000.00</b>	<b>22.68</b>	<b>910.747.000.00</b>	<b>78.94</b>
	4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.153.727.000.00	0.00	78.94	0.00	0	261.710.000.00	0	910.747.000.00	0
<b>Total Per Sasaran</b>			<b>82.544.435.414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.991.475.097.00</b>	<b>32.70</b>	<b>39.073.407.084.00</b>	<b>47.34</b>	<b>73.778.624.826.00</b>	<b>89.38</b>
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas</b>											
<b>5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
	5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>282.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>31.236.600.00</b>	<b>11.08</b>	<b>73.274.620.00</b>	<b>25.98</b>	<b>256.212.736.00</b>	<b>90.86</b>
	5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.100.000.00	0.00	86.74	5.947.100.00	0	13.619.800.00	0	65.141.716.00	0

	5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000.00	0.00	100	3.043.300.00	0	9.256.450.00	0	14.999.750.00	0
	5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.550.000.00	0.00	100	5.615.700.00	0	8.510.300.00	0	21.549.700.00	0
	5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000.00	0.00	100	2.237.900.00	0	4.537.100.00	0	14.999.850.00	0
	5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.550.000.00	0.00	99.53	2.383.300.00	0	4.933.100.00	0	20.452.400.00	0
	5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.400.000.00	0.00	90.29	3.568.700.00	0	7.374.750.00	0	78.916.300.00	0
	5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.400.000.00	0.00	84.71	8.440.600.00	0	25.043.120.00	0	40.153.020.00	0
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<b>76.854.103.917.00</b>	<b>10.348.258.483.00</b>	<b>13.46</b>	<b>32.555.684.052.00</b>	<b>42.36</b>	<b>46.466.860.809.00</b>	<b>60.46</b>	<b>66.037.698.557.00</b>	<b>85.93</b>
	5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.514.453.917.00	10.348.258.483.00	85.86	32.427.152.552.00	0	46.209.519.259.00	0	65.698.074.657.00	0
	5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	314.650.000.00	0.00	100	118.591.300.00	0	237.480.000.00	0	314.645.500.00	0
	5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.000.000.00	0.00	99.91	9.940.200.00	0	19.861.550.00	0	24.978.400.00	0
5.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<b>56.300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>9.927.520.00</b>	<b>17.63</b>	<b>16.890.920.00</b>	<b>30</b>	<b>56.299.770.00</b>	<b>100</b>
	5.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.300.000.00	0.00	100	9.927.520.00	0	16.890.920.00	0	56.299.770.00	0
5.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<b>100.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>9.345.900.00</b>	<b>9.35</b>	<b>55.740.678.00</b>	<b>55.74</b>
	5.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000.00	0.00	55.74	0.00	0	9.345.900.00	0	55.740.678.00	0
5.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>849.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>171.285.580.00</b>	<b>20.17</b>	<b>445.091.278.00</b>	<b>52.43</b>	<b>798.345.922.00</b>	<b>94,03</b>
	5.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000.00	0.00	96.8	4.460.200.00	0	10.405.200.00	0	24.200.000.00	0
	5.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.500.000.00	0.00	97.93	0.00	0	23.000.000.00	0	208.100.000.00	0
	5.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000.00	0.00	99.96	1.242.400.00	0	5.726.400.00	0	16.492.840.00	0
	5.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000.00	0.00	99.67	2.950.000.00	0	8.200.000.00	0	14.950.000.00	0
	5.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580.000.000.00	0.00	92.07	162.632.980.00	0	397.759.678.00	0	534.603.082.00	0
	5.5.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00	0.00	92.07	0.00	0	0.00	0	0.00	0

5.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>257.003.397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>256.673.300.00</b>	<b>99.87</b>
5.6.1	<i>Pengadaan Mebel</i>	257.003.397.00	0.00	99.87	0.00	0	0.00	0	256.673.300.00	0
5.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>1.539.631.783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>659.869.808.00</b>	<b>42.86</b>	<b>1.016.271.824.00</b>	<b>66.01</b>	<b>1.506.498.141.00</b>	<b>97.85</b>
5.7.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	20.000.000.00	0.00	93.23	3.329.000.00	0	7.329.000.00	0	18.646.800.00	0
5.7.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	471.995.180.00	0.00	98	236.364.646.00	0	343.305.406.00	0	462.532.267.00	0
5.7.3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.047.636.603.00	0.00	97.87	420.176.162.00	0	665.637.418.00	0	1.025.319.074.00	0
5.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>630.000.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>161.427.100.00</b>	<b>25.62</b>	<b>282.902.300.00</b>	<b>44.91</b>	<b>559.374.300.00</b>	<b>88.79</b>
5.8.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	220.000.000.00	0.00	81.47	78.322.400.00	0	133.172.300.00	0	179.239.375.00	0
5.8.2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	200.000.000.00	0.00	85.19	83.104.700.00	0	144.240.000.00	0	170.384.925.00	0
5.8.3	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	30.000.000.00	0.00	100	0.00	0	5.490.000.00	0	30.000.000.00	0
5.8.4	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	180.000.000.00	0.00	99.86	0.00	0	0.00	0	179.750.000.00	0
5.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	<b>32.333.753.974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>8.300.703.915.00</b>	<b>25.67</b>	<b>13.024.247.046.00</b>	<b>40.28</b>	<b>25.157.330.696.00</b>	<b>77.81</b>
5.9.1	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	32.333.753.974.00	0.00	77.81	8.300.703.915.00	0	13.024.247.046.00	0	25.157.330.696.00	0
<b>Total Per Sasaran</b>		<b>112.901.793.071.00</b>	<b>10.348.258.483.00</b>	<b>9.17</b>	<b>41.890.134.575.00</b>	<b>37.10</b>	<b>61.334.884.697.00</b>	<b>54.33</b>	<b>94.684.174.100,15</b>	<b>83.86</b>
<b>Grand Total</b>		<b>195.446.228.485.00</b>	<b>10.348.258.483.00</b>	<b>5.29</b>	<b>68.881.609.672.00</b>	<b>35.24</b>	<b>100.408.291.781.00</b>	<b>51.37</b>	<b>168.462.798.926,15</b>	<b>86.19</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas**

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan Sumber Daya Manusia, Sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan kondisi Kesehatan masyarakat tahun 2024 kedepannya Dinas Kesehatan mengembangkan pelayanan Kesehatan dengan memindahkan Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas ke Muara Beliti dan terus berusaha memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan sehingga diharapkan Masyarakat memperoleh pelayanan Kesehatan yang berkualitas.

Berikut capaian sasaran strategis dari enam (6) indikator kinerja yang dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Angka harapan hidup dari target 69,5 reliasasi sebesar 68,95 dengan capaian sebesar 99,21 %.
2. Angka Kematian Ibu dari target 30,82 per 100.000 KH dengan realisasi 77,05 per 100.000 KH dengan capaian sebesar 165,00 %
3. Angka Kematian Bayi dari target 3,01 per 1.000 KH dengan realisasi 2,00 dengan capaian 133,55 %
4. Prevalensi stunting dari target 8 % dengan realisasi 4,48 % dengan persentase capaian 199,25 %
5. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari target 80,06 predikat A, dengan realisasi BB nilai 75,60 persentase capaian 94,43 %.

6. Indeks profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas target 85 dengan realisasi 70,25 dan persentase capaian 82,64 %

## 2. Permasalahan

Sebagian besar capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten belum mencapai 100 %, hal ini di pengaruhi oleh :

- a. Kegiatan antara bidang dan pengelola program belum semuanya bersinergi.
- b. Keterbatasan anggaran dalam mencapai indikator kinerja.
- c. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang belum optimal

## B. Rekomendasi

Solusi yang akan dilakukan agar target indikator kinerja pada Dinas Kesehatan tercapai antara lain :

- a. Sinergitas dalam melaksanakan kegiatan dan pengelola program antar bidang baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
- b. Peningkatan kompetensi ASN pada Dinas Kesehatan melalui Bimtek/Pelatihan.
- c. Perlunya komitmen pemenuhan dokumen sebagai data/informasi untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada perangkat daerah.
- d. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi rencana kerja bidang Kesehatan yang telah di susun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Pangeran Moehamad Amin Komp. Pemda Kabupaten Musi Rawas  
Telp. (0733) 4550076 Fax. (0733) 45077  
www.dinkes.musirawaskab.go.id MUARA BELITI@musirawaskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS  
**Jabatan** : Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**Nama** : RATNA MACHMUD  
**Jabatan** : BUPATI MUSI RAWAS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Beliti, Januari 2023

PIHAK KEDUA  
  
RATNA MACHMUD

PIHAK PERTAMA  
  
drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS  
PEMBINA  
NIP. 198112062009032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Sasaran Strategis Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	69,01 Tahun
		Angka Kematian Ibu	88,05 per 100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi	3,01 per 1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi Stunting	6%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kesehatan	A
		Indeks Profesionalitas Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	85

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 91.482.647.152	APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 38.605.956.312	APBD
3.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 160.000.000	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 60.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 60.000.000	APBD
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 130.368.603.464</b>	

Muara Beliti, Januari 2023



PIL. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS.  
PEMBINA  
NIP. 198112062009032004



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Pangeran Moehamad Amin Komp. Pemda Kabupaten Musi Rawas  
Telp. (0733) 4550076 Fax. (0733) 45077  
www.dinkes.musirawaskab.go.id MUARA BELITI@musirawaskab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS  
**Jabatan** : Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**Nama** : RATNA MACHMUD  
**Jabatan** : BUPATI MUSI RAWAS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

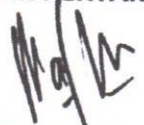
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Beliti, 2 Oktober 2023

**PIHAK KEDUA**

  
RATNA MACHMUD

**PIHAK PERTAMA**

  
drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS  
PEMBINA  
NIP. 198112062009032004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

No	Sasaran Strategis Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	69,5 Tahun
		Angka Kematian Ibu	88,05 per 100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi	3,01 per 1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi Stunting	6%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kesehatan	A
		Indeks Profesionalitas Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas	85

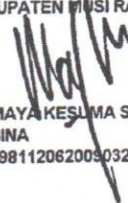
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 112.901.793.071	APBD-P
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 75.661.678.847	APBD-P
3.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 5.169.487.567	APBD-P
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 362.287.000	APBD-P
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.350.982.000	APBD-P
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 195.446.228.485</b>	

Muara Beliti, 2 Oktober 2023

BUPATI MUSI RAWAS

  
RATNA MACHMUD

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

  
drg. MAYA KESUMA SURYA PUTRI, MARS.  
PEMBINA  
NIP. 198112062009032004